

## **Menaikkan Sektor Pajak Daerah, Bapenda Tapin Tambah 22 Alat Perekam Transaksi**



**Sumber gambar:**

**<https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/03/18/menaikkan-sektor-pajak-daerah-bapenda-tapin-tambah-22-alat-perekam-transaksi>**

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tapin berencana menambah alat perekam transaksi untuk rumah makan, cafe dan hotel untuk tingkatan pendapatan asli daerah.

Kepala Bapenda Tapin Sapuani mengatakan 2022 sudah ada 20 alat perekam transaksi yang dipasang.

"Sepanjang Kecamatan Binuang sampai Lokpaikat yang ada rumah makan akan dipasang alat perekam transaksi," ujarnya, Kamis.

Pemasangan alat perekam transaksi itu sudah disosialisasikan bersama Bank Kalsel selaku penyedia alat perekam transaksi.

Sapuani mengatakan pemasangan alat perekam transaksi itu sudah disosialisasikan bersama Bank Kalsel selaku penyedia.

"Pihak rumah makan, cafe maupun hotel sudah mau bekerjasama dan siap untuk dipasangkan," lanjutnya.

Ia mengatakan apabila diterapkan, akan meningkatkan PAD 2022 secara hitungan bisa mencapai Rp 2,6 miliar.

"Hal ini sudah terbukti karena selama 2021 kemarin total pendapatan dari pemasangan alat perekam transaksi ini menaikkan sektor pajak yang cukup signifikan," jelasnya.

**Sumber berita:**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/03/18/menaikkan-sektor-pajak-daerah-bapenda-tapin-tambah-22-alat-perekam-transaksi>, Menaikkan Sektor Pajak Daerah, Bapenda Tapin Tambah 22 Alat Perekam Transaksi, 18 Maret 2022.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/316821/bank-kalsel-bapenda-tapin-pasang-alat-perekam-transaksi-untuk-tambah-pad>, Bank Kalsel: Bapenda Tapin Pasang Alat Perekam Transaksi Untuk Tambah PAD, 10 Maret 2022.

**Catatan:**

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

### **Jenis-Jenis Retribusi Daerah**

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu